



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka mendukung aspek operasional, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa angkutan penumpang serta dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, maka besarnya tarif angkutan yang diperkenankan diberlakukan batasan dengan sistem tarif batas atas dan batas bawah dari tarif dasar;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan maksud butir b tersebut diatas, agar memenuhi aspek legalitas dan solvabilitas, dipandang perlu mengatur kembali tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Jo Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksana Dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengurangan Subsidi Bahan Bakar minyak (BBM);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995 tentang Izin Trayek Mobil Bus dan Izin Operasi Taksi Bagi Kendaraan umum Antar Kota Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tanggal 16 Juni 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota kelas ekonomi;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2005 tanggal 1 Oktober 2005 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 143 Tahun 1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Pola Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) oleh Perusahaan Angkutan di Propinsi Lampung;
 6. Surat Ketua DPD ORGANDA Provinsi Lampung Nomor 30/DPD-ORGANDA/VIII/X/2005 tanggal 1 Oktober 2005 tentang Penyesuaian Tarif Bus AKDP.
 7. Berita Acara Kesepakatan Penyesuaian tarif bus AKDP antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Komisi B dan D DPRD Provinsi Lampung, Ditlantas Polda Lampung, DPD Organda Lampung, YLKI Lampung, PT. Jasa Raharja, Biro Hukum, Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung pada tanggal 3 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi ditetapkan berdasarkan tarif dasar yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif dasar angkutan penumpang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 120 (seratus dua puluh) per penumpang per kilometer.

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif yang diperkenankan diberlakukan bagi penumpang ditentukan berdasarkan batasan tarif batas atas dan tarif batas bawah dari tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2);
- (2) Besarnya tarif batas atas angkutan penumpang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebesar tarif dasar ditambah dengan asumsi margin keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif dasar, sehingga tarif batas atas sebesar Rp. 144 (seratus empat puluh empat) per penumpang per kilometer.
- (3) Besarnya tarif batas bawah angkutan penumpang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebesar tarif dasar dikurangi dengan asumsi biaya penyusutan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif dasar, sehingga tarif batas bawah sebesar Rp 96 (sembilan puluh enam) per penumpang per kilometer.
- (4) Besarnya biaya yang dibayarkan oleh setiap penumpang, ditetapkan berdasarkan batasan antara tarif batas atas dengan tarif batas bawah dan dihitung dengan cara pembulatan dari hasil pengalian tarif dasar dimaksud dengan jarak tempuh dan ditambah iuran wajib Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp 60 (enam puluh rupiah) untuk setiap kali keberangkatan.

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Besarnya tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp 60,- (enam puluh) per penumpang.

Pasal 4

- (1) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) menentukan sendiri besarnya tarif angkutan, yang besarnya tidak boleh melebihi tarif batas atas dan kurang dari tarif batas bawah.
- (2) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) wajib melaporkan besarnya tarif yang ditetapkan kepada Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota sesuai domisili dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.

Pasal 5

- (1) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi, diwajibkan memasang papan pengumuman tarif pada tempat-tempat yang mudah terlihat oleh para calon penumpang dan menempelkan stiker pada kendaraannya yang menunjukkan besarnya tarif sesuai lintasan trayek yang dilalui.
- (2) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi diwajibkan memberikan tanda bukti pembayaran dengan harga tiket pada karcis yang telah dicetak kepada setiap penumpang.

Pasal 6

Setiap perusahaan angkutan penumpang yang melanggar ketentuan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dinas Perhubungan Propinsi Lampung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Oktober 2005

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN ZP.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
5. Kepala Dinas/Instansi terkait Se-Propinsi Lampung;
6. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung;
7. Direksi PT. Jasa Raharja Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua DPD ORGANDA Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Himpunan Peraturan Gubernur

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 23 TAHUN 2005
 TANGGAL : 3 Oktober 2005

**DAFTAR TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
 DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
 DI PROVINSI LAMPUNG**

No	Lintasan Trayek (Asal - Tujuan)	Jarak (Km)	Tarif Dasar	Tarif Jarak Batas atas	Tarif Jarak Batas bawah
1	2	3	4	5	6
A	Kota Bandar Lampung - Kab. Lampung Selatan				
	Rajabasa - Bakauheni PP (melalui : Kalianda)	97	11,700	14,028	9,372
B	Kota Bandar Lampung - Kab. Lampung Utara				
	1 Rajabasa - Kotabumi PP (melalui : Bandarjaya)	102	12,300	14,748	9,852
	2 Rajabasa - Kotabumi PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Bumi Agung)	169	20,340	24,396	16,284
	3 Rajabasa - Kotabumi PP (melalui : Bandarjaya - Menggala - Panaragan)	190	22,860	27,420	18,300
	4 Rajabasa - Bk. Kemuning PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi)	142	17,100	20,508	13,692
C	Kota Bandar Lampung - Kab. Way Kanan				
	1 Rajabasa - Baradatu PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning)	169	20,340	24,396	16,284
	2 Rajabasa - Blambangan Umpu PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Baradatu - Simpang Empat)	210	25,260	30,300	20,220
	3 Rajabasa - Blambangan Umpu PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - Tl. Buyut - Negara Ratu - Sopoyono)	226	27,180	32,604	21,756
	4 Rajabasa - Gincing PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - Baradatu - Simp. Empat - Blambangan Umpu - Kasui - Tanjung Kurung)	234	28,140	33,756	22,524
	5 Rajabasa - Bahuga PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - Blambangan Umpu)	168	20,220	24,252	16,188
	6 Rajabasa - Bahuga PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Neg. Ratu - Pakuon Ratu)	226	27,180	32,604	21,756
	7 Rajabasa - Kasui PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - Baradatu)	204	24,540	29,436	19,644
	8 Rajabasa - Pakuon Ratu PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Ketapang - Neg. Ratu - Bunga Mayang)	239	28,740	34,476	23,004
	9 Rajabasa - Pakuon Ratu PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Panaragan Jaya)	239	28,740	34,476	23,004
D	Kota Bandar Lampung - Kab. Tulangbawang				
	1 Rajabasa - Menggala PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Panaragan Jaya)	117	14,100	16,908	11,292
	2 Rajabasa - Rawajitu PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	267	32,100	38,508	25,692
	3 Rajabasa - Rawajitu PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	243	29,220	35,052	23,388
	4 Rajabasa - Dipasena PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	284	34,140	40,956	27,324
	5 Rajabasa - Dipasena PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	260	31,260	37,500	25,020
	6 Rajabasa - Penangkis PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar - Rawajitu)	249	29,940	35,916	23,964

1	2	3	4	5	6
	7 Rajabasa - Teladas PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar - Bakung)	236	28,380	34,044	22,716
	8 Rajabasa - Mesuji PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	270	32,460	38,940	25,980
	9 Rajabasa - Mesuji PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	253	30,420	36,492	24,348
	10 Rajabasa - Wiralaga PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	284	34,140	40,956	27,324
	11 Rajabasa - Rawajitu PP (melalui : Metro - Kota Gajah - Gunung Sugih - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	288	34,620	41,532	27,708
	12 Rajabasa - Mesuji PP (melalui : Metro - Kota Gajah - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Simpang penawar)	286	34,380	41,244	27,516
	13 Rajabasa - Panaragan jaya PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni)	118	14,220	17,052	11,388
	14 Panjang - Rawajitu PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	285	34,260	41,100	27,420
E	Kota Bandar Lampung - Kab. Lampung Barat				
	1 Rajabasa - Sumber Jaya PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning)	165	19,860	23,820	15,900
	2 Rajabasa - Krui PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Sumber Jaya - Liwa)	267	32,100	38,508	25,692
	3 Rajabasa - Krui PP (melalui : Bandar Jaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Sumber Jaya)	235	28,260	33,900	22,620
	4 Rajabasa - Sekincau PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Sumber Jaya)	194	23,340	27,996	18,684
	5 Rajabasa - Way Betanding PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning- Sumber Jaya - Liwa - Krui)	280	33,660	40,380	26,940
F	Kota Bandar Lampung - Kota Metro				
	Rajabasa - Metro (Terminal Mulyojati) PP	42	5,100	6,108	4,092
G	Kota Bandar Lampung - Kab. Lampung Tengah				
	1 Rajabasa - Spt. Surabaya PP (melalui : Metro - Kota Gajah - Spt. Banyak - Rumbia)	125	15,060	18,060	12,060
	2 Rajabasa - Bratasena PP (melalui : Metro - Kota Gajah - Spt. Banyak - Rumbia - Spt. Surabaya)	136	16,380	19,644	13,116
	3 Rajabasa - Proy. Sindang PP	132	15,900	19,068	12,732
H	Kota Bandar Lampung - Kab. Lampung Timur				
	1 Rajabasa - Labuhan Maringgai PP (melalui : Metro - Sukadana - Way Jepara)	126	15,180	18,204	12,156
	2 Rajabasa - Labuhan Maringgai PP (melalui : Metro - Sukadana - Jabung)	134	16,140	19,356	12,924
	3 Rajabasa - Jabung PP (melalui : Metro - Way Jepara - Labuhan Maringgai)	140	16,860	20,220	13,500
	4 Rajabasa - Way Mili PP (melalui : Metro - Sukadana - Way Jepara - Labuhan Maringgai)	164	19,740	23,676	15,804
	5 Rajabasa - Jabung PP (melalui : Metro - Gd. Dalem - Purbolinggo - Sukadana - Way Jepara - Labuhan Maringgai)	138	16,620	19,932	13,308
	6 Panjang - Way Mili PP (melalui : sribawono - Labuhan Maringgai)	85	10,260	12,300	8,220

1	2	3	4	5	6
I	Kota Bandar Lampung - Kab. Tanggamus				
	1 Rajabasa - Kota Agung PP (melalui : Pringsewu - Talang Padang)	97	11,700	14,028	9,372
	2 Rajabasa - Wonosobo PP (melalui : Pringsewu - Talang Padang - Kota Agung)	109	13,140	15,756	10,524
	3 Rajabasa - Pangkul PP (melalui : Pringsewu - Talang Padang - Kota Agung - Wonosobo)	114	13,740	16,476	11,004
	4 Rajabasa - Gn. Batu PP (melalui : Pringsewu - Talang Padang - Gisting)	90	10,860	13,020	8,700
	5 Rajabasa - Pardasuka PP (melalui : Gedong Tataan - Kedondong)	42	5,100	6,108	4,092
J	Kab. Lampung Utara - Kab. Lampung Timur				
	Kotabumi - Labuhan Meringgai PP (melalui : bandarjaya - Gn. Sugih - Kota Gajah - Terminal Mulyojati - Sukadana - Sribawono)	125	15,060	18,060	12,060
K	Kab. Lampung Utara - Kab. Lampung Tengah				
	Bukit Kemuning - Seputih Surabaya PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Sugih - Kota Gajah - terminal Mulyojati - Rumbia)	76	9,180	11,004	7,356
L	Kab. Way Kanan - Kab. Lampung Timur				
	Pakuon Ratu - Labuhan Meringgai PP (melalui : Negara Ratu - Ketapang - Kotabumi - Bandarjaya - Kota Gajah - Sukadana - Way Jepara)	285	34,260	41,100	27,420
M	Kab. Lampung Timur - Kab. Tulangbawang				
	1 Labuhan Meringgai - Rawajitu PP (melalui : Way Jepara - Sukadana - Terminal Mulyojati - Kota Gajah - Gn. Sugih - Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	257	30,900	37,068	24,732
	2 Labuhan Meringgai - Mesuji PP (melalui : Way Jepara - Sukadana - Terminal Mulyojati - Kota Gajah - Gn. Sugih - Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	268	32,220	38,652	25,788
	3 Labuhan Meringgai - Menggala PP (melalui : Sukadana - Gedong Dalem - Kota Gajah - Bandarjaya - Gn. Batin)	165	19,860	23,820	15,900
	4 Labuhan Meringgai - Wiralaga PP (melalui : Way Jepara - Sukadana - Terminal Mulyojati - Kota Gajah - Bandarjaya - Gn. Batin - Way Abung - Menggala - Sp. Penawar - Mesuji)	278	33,420	40,092	26,748
N	Kab. Lampung Tengah - Kab. Lampung Selatan				
	1 Terminal Mulyojati - Bakauheni PP (melalui : Kota Gajah - Gn. Sugih - Rajabasa - Kalianda)	130	15,660	18,780	12,540
	2 Bandarjaya - Kota Metro PP (melalui : Terminal Rajabasa - Kalianda)	85	10,260	12,300	8,220
O	Kab. Tulangbawang - Kota Metro				
	1 Menggala - Kota Metro PP (melalui : Panaragan - Daya Murni - Gn. Batin - Bandarjaya - Kota Gajah)	114	13,740	16,476	11,004
	2 Mesuji - Kota Metro PP (melalui : Kota Gajah - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	185	22,260	26,700	17,820
P	Kab. Tanggamus - Kab. Tulangbawang				
	1 Kota Agung - Mesuji PP (melalui : Talang Padang - Pringsewu - Kalirejo - Wates - Bandarjaya - Gn. Batin - Way Abung - Panaragan - Menggala - Unit II Tulangbawang - Simpang Penawar)	264	31,740	38,076	25,404
	2 Wonosobo - Rawajitu PP (melalui : Kota Agung - Pringsewu - Kalirejo - Wates - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Unit II Tulang Bawang - Sp. Penawar)	271	32,580	39,084	26,076

1	2	3	4	5	6
	3 Kota Agung - Rawajitu PP (melalui : Talang Padang - Pringsewu - Kalirejo - Wates - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Unit II Tulangbawang)	256	30,780	36,924	24,636
	4 Gunung Mekar - Rawajitu PP (melalui : Jabung - Sekampung - Metro - Kota Gajah - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	218	26,220	31,452	20,988
	5 Wonosobo - Dipasena PP (melalui : Kota Agung - Talang Padang - Pringsewu - Kalirejo - Wates - Bandarjaya - Gn. Batin - Way Abung - Menggala - Unit II Tulangbawang - Simpang Penawar)	264	31,740	38,076	25,404
	6 Mesuji - Wonosobo PP (melalui : Sp. Penawar - Spt Banyak - Kota Gajah - Gedong Dalem - Metro (Terminal Mulyojati) - Sukadana - Way Jepara)	268	32,220	38,652	25,788
Q	Kab. Lampung Tengah - Kab. Lampung Timur Gaya Baru - Labuhan Maringgai PP (melalui : Rumbia - Spt. Banyak - Kota Gajah - Gedong Dalem - Metro (Terminal Mulyojati) - Sukadana - Way Jepara)	148	17,820	21,372	14,268
F	Kota Metro - Kab. Way Kanan Metro - Tanjungkurung PP (melalui : Kota Gajah - Kotabumi - Bk. Kemuning - Baradatu)	210	25,260	30,300	20,220
S	Kab. Way Kanan - Kab. Lampung Tengah Pakuon Ratu - Gaya Baru PP (melalui : Neg. Ratu - Ketapang - Kotabumi - Bandarjaya - Kota Gajah - Rumbia)	200	24,060	28,860	19,260
T	Kab. Lampung Tengah - Kab. Lampung Barat Gaya Baru - Krui PP (melalui : Kota Gajah - Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - Liwa)	224	26,940	32,316	21,564
U	Kota Metro - Kab. Lampung Tengah Kota Metro - Gaya Baru PP (melalui : Kota Gajah)	79	9,540	11,436	7,644
V	Kab. Lampung Tengah - Kab. Tulangbawang Gaya Baru - Rawajitu PP (melalui : Spt. Banyak - Kota Gajah - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Simpang Penawar)	243	29,220	35,052	23,388

- Keterangan :
- 1 Tarif Jarak = Tarif Dasar x Jarak + Jasa Raharja (Rp 60)
 - 2 Pembulatan tarif dalam ratusan rupiah
 - 3 Tarif Dasar batas atas AKDP Rp 120/Pnp-Km + 20 % = 144/pnp/Km
 - 4 Tarif Dasar batas bawah AKDP Rp. 120/pnp/Km-20 %=96/Pnp/Km

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN ZP